



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DESA SANUR
BANK SANUR

Nomor : 229/BDS/Dir/VII/2026

Denpasar, 30 Juli 2026

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Kepada Yth.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Bali
Jl. WR. Supratman No. 1 Dangin Puri Kangin
Denpasar 80237

Perihal : Laporan Profil Manajemen Risiko Semester I Tahun 2026

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Profil Manajemen Risiko Semester I Tahun 2026 dari PT. BPR. Desa Sanur. (terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR. DESA SANUR
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DESA SANUR

I Made Wandika, SE

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

PT. BPR DESA SANUR

30 Juni 2026



JL. DANAU BUYAN III / 2

TELEPON: 0361288246



LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Bulan : Juni
Tahun : 2026
Jumlah Modal Inti : Rp10.746.116.403
Total Aset : Rp138.604.327.532
Jumlah Kantor Cabang : 0

1. TKS BPR dan Indikator Keuangan

No	Indikator	Nilai	Keterangan
1.	Peringkat TKS	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan adalah 2 (Sehat). Kondisi BPR secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
2.	Peringkat TKS Faktor Profil Risiko	2	Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen. Pada periode penilaian semester I tahun 2026 terdapat parameter risiko yang menjadi fokus perhatian bagi BPR, antara lain: Pada periode penilaian semester I tahun 2026 terdapat parameter risiko yang menjadi fokus perhatian bagi BPR, antara lain: 1. Risiko Inheren untuk Risiko Kredit, pada pilar / parameter strategi penyediaan dana, BPR masih mengalami pertumbuhan kredit Januari 2026 ke Juni 2026 (YoY). Rasio ini lebih rendah daripada pertumbuhan kredit industri sebesar 10,05%. 2. Rasio pendanaan non inti terhadap total



			pendanaan adalah 21.75%. Rasio pendanaan non inti lebih besar daripada ambang batas 10% (peringkat Sangat Rendah). Rasio ini cukup signifikan terhadap total pendanaan namun masih dapat dikelola oleh BPR.
3.	Peringkat TKS Faktor Tata Kelola	2	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
4.	Peringkat TKS Faktor Rentabilitas	1	Penilaian faktor Rentabilitas adalah 1 (Sangat Baik).
5.	Peringkat TKS Faktor Permodalan	1	Penilaian faktor Permodalan adalah 1 (Sangat Baik).
6.	Cash Ratio	19.42%	Cash Rasio (CR) sebesar 19,42% (Sehat). Angka ini di atas 5% atau melewati batas minimal TKS CAMEL ($\geq 4,05\%$). Dari sisi perhitungan Cash Ratio sesuai SEOJK No. 1 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BPR, nilai rasio CR di bawah peringkat 1 (Sangat Rendah dengan threshold $\geq 20,00\%$).
7.	Loan To Deposit Ratio	77%	Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana yang Dihimpun (LDR- Loan to Deposit Ratio 77,00% (Sehat). Angka ini masih di bawah batas maksimal TKS ($\leq 94,75\%$). Dan dari sisi perhitungan risiko Likuiditas sesuai SEOJK No. 1 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BPR, nilai rasio LDR ini (77,00%) berada pada peringkat 1 (Sangat Rendah dengan threshold $\geq 90,00\%$).
8.	KPMM	22.75%	KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) di atas 12% sesuai batas minimal ketentuan regulator (OJK) dan di atas threshold peringkat 1 (faktor Permodalan Parameter KPMM pada TKS RGEC $\geq 15,00\%$).
9.	NPL Gross	5.46%	NPL Gross masih di atas 5%
10.	NPL Net	3.81%	NPL Net masih di atas 3%

Pemantauan terhadap penilaian TKS dan Indikator keuangan memprediksi masalah yang muncul serta dapat mengantisipasinya sejak dini. TKS berada pada tingkat Sehat dan agar terus dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Risiko Inheren - Kredit



Pilar dan Parameter		Nominal	Deskripsi / Catatan
1	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset		
	Total Aset Produktif	Rp 135.316.067.275	
	Total Aset	Rp 139.214.755.570	
	Hasil	97.2%	
	Peringkat Risiko Inheren Kredit - Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset	Peringkat Risiko: 2	PT. BPR DESA SANUR mencatat total aset produktif sebesar Rp135.316.067.275 dan total aset Rp139.597.893.412, menghasilkan rasio aset produktif terhadap total aset sebesar 96,93%. Berdasarkan kriteria OJK, rasio di atas 95% termasuk dalam peringkat risiko 2 (Rendah) dengan eksposur risiko kredit rendah pada komponen aset produktif. Oleh karena itu, peringkat risiko yang dipilih PT. BPR DESA SANUR adalah 2, sesuai dengan data internal yang menunjukkan eksposur risiko kredit rendah.
2	Rasio Total KYD (Bank dan Pihak Ketiga Non Bank) terhadap Total Aset Produktif		
	Total Kredit Yang Diberikan (KYD Bank dan Pihak Ketiga Non Bank) Gross	Rp 95.948.412.199	
	Total Aset Produktif	Rp 135.316.067.275	
	Hasil	70.91%	
	Peringkat Risiko Inheren Kredit - Rasio KYD terhadap Total Aset Produktif	Peringkat Risiko: 1	PT. BPR DESA SANUR menilai rasio Total KYD terhadap Total Aset Produktif sebesar 70,91% yang berada di bawah batas maksimal 75% untuk Peringkat 1 (Sangat Rendah) sebagaimana ditetapkan OJK. Dengan rasio tersebut, kriteria OJK mengklasifikasikan risiko kredit sebagai Sangat Rendah, yang konsisten dengan Peringkat Risiko yang dipilih oleh PT. BPR DESA SANUR. Hal ini menunjukkan bahwa skema kredit yang diberikan mayoritas bersifat sederhana dan jenis kredit tidak beragam, sesuai



			dengan deskripsi Peringkat 1. Oleh karena itu, profil risiko kredit PT. BPR DESA SANUR berada dalam kategori paling aman menurut standar regulator.
3	Rasio 25 debitur terbesar terhadap KYD Kepada Bukan Bank		
	Total Baki Debet 25 Debitur Terbesar	Rp 42.290.955.046	
	KYD Kepada Bukan Bank	Rp 95.948.412.199	
	Hasil	44.08%	
	Peringkat Risiko Inheren Kredit - Rasio 25 debitur terbesar terhadap KYD Kepada Bukan Bank	Peringkat Risiko: 3	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio 25 debitur terbesar terhadap KYD sebesar 44.08% yang berada di atas batas 20% untuk peringkat sangat rendah, sehingga sesuai dengan kriteria OJK untuk peringkat 3 (Sedang) yang menetapkan rasio >20% dengan target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama; total baki debet 25 debitur terbesar sebesar Rp42.290.955.046 dan KYD sebesar Rp95.948.412.199 mendukung penetapan peringkat risiko ini.
4	Rasio kredit per sektor Ekonomi Terbesar terhadap KYD Kepada Bukan Bank		
	Total Kredit Kategori 3 Sektor Ekonomi Terbesar	Rp 90.336.626.838	
	KYD Kepada Bukan Bank	Rp 95.948.412.199	
	Hasil	94.15%	
	Peringkat Risiko Inheren Kredit - Rasio kredit per sektor Ekonomi Terbesar terhadap KYD Kepada Bukan Bank	Peringkat Risiko: 2	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio kredit per tiga sektor ekonomi terbesar terhadap KYD sebesar 94,15% yang berada di atas ambang >85% sebagaimana ditetapkan OJK. Sesuai kriteria OJK, rasio >85% dengan kondisi tidak berubah dalam jangka waktu sangat lama termasuk dalam Peringkat 2 (Rendah). Oleh karena itu, peringkat risiko yang



			dipilih adalah 2 (Rendah).
5	Aset produktif bermasalah / total aset produktif		
	Total Aset Produktif NPL	Rp 5.238.307.606	
	Total Aset Produktif	Rp 135.316.067.275	
	Hasil	3.87%	
	Peringkat Risiko Inheren Kredit - Aset produktif bermasalah / total aset produktif	Peringkat Risiko: 1	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan data risiko kredit, rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif sebesar 3,87% berada di bawah ambang batas 7% untuk Peringkat 1 (Sangat Rendah) menurut OJK. Hal ini menunjukkan kualitas pemberian kredit yang baik dengan kredit restrukturisasi tidak signifikan serta penurunan kualitas kredit yang tidak signifikan. Komponen aset produktif bermasalah mayoritas bukan merupakan penempatan pada bank lain, sehingga tidak menambah risiko. Dengan demikian, peringkat risiko yang dipilih yaitu Peringkat 1 sesuai dengan kondisi aktual dan mencerminkan risiko kredit yang sangat rendah.
6	Kredit Bermasalah Neto / KYD kepada Bukan Bank		
	Kredit Bermasalah Neto	Rp 5.238.307.606	
	Kredit Yang Diberikan (KYD) Kepada Non Bank (Gross)	Rp 95.948.412.199	
	Hasil	5.46%	
	Peringkat Risiko Inheren Kredit - Kredit Bermasalah Neto / KYD kepada Bukan Bank	Peringkat Risiko: 2	PT. BPR DESA SANUR menilai bahwa rasio Kredit Bermasalah Neto terhadap KYD kepada bukan bank sebesar 5,46 % berada di atas ambang batas 5 % untuk peringkat 1 sehingga sesuai dengan peringkat 2 (Rendah) menurut kriteria OJK. Pada peringkat ini, indikator menunjukkan bahwa kredit restrukturisasi tidak signifikan, penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non



			Performing Loan tidak signifikan, serta sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan. Selain itu, jumlah kredit lancar yang menunggak lebih dari 7 hari tidak signifikan dan komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain. Dengan demikian, kualitas pemberian kredit dinilai baik dan risiko kredit berada pada tingkat rendah.
7	Kredit Kualitas Rendah / KYD kepada Bukan Bank		
	Kredit Kualitas Rendah (KKR)	Rp 6.558.546.354	
	Kredit Yang Diberikan (KYD) Kepada Non Bank (Gross)	Rp 95.948.412.199	
	Hasil	6.84%	
	Peringkat Risiko Inheren Kredit - Kredit Kualitas Rendah / KYD kepada Bukan Bank	Peringkat Risiko: 1	PT. BPR DESA SANUR menilai bahwa rasio Kredit Kualitas Rendah terhadap Kredit Yang Diberikan kepada non- bank sebesar 6,84% berada di bawah ambang batas 7% sehingga termasuk dalam Peringkat 1 (Sangat Rendah) sesuai kriteria OJK, yang menandakan kualitas kredit masih baik dan tidak signifikan terdapat kredit restrukturisasi, penurunan kualitas, atau penunggakan >7 hari. Data internal bank menunjukkan KKR sebesar Rp6.558.546.354 dari total KYD Rp95.948.412.199, konsisten dengan peringkat yang dipilih. Dengan demikian, risiko kredit KYD kepada bukan bank dinilai rendah dan tidak memerlukan tindakan mitigasi khusus pada saat ini.

Pemantauan terhadap Risiko Inheren - Kredit merupakan pemantauan terhadap risiko yang melekat pada kegiatan pengelolaan kredit Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.



3. Risiko Inheren - Likuiditas

Pilar dan Parameter		Nominal	Deskripsi / Catatan
1	Rasio Aset Likuid Terhadap Total Aset		
	Aset Likuid	Rp 43.123.157.976	
	Total Aset	Rp 139.214.755.570	
	Hasil	30.98%	
	Peringkat Risiko Inheren Likuiditas - Rasio Aset Likuid Terhadap Total Aset	Peringkat Risiko: 1	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio aset likuid terhadap total aset sebesar 18,49% yang berada di atas ambang batas 15% untuk peringkat risiko likuiditas sangat rendah menurut kriteria OJK; dengan demikian aset likuid perusahaan cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo. Peringkat risiko yang dipilih adalah 1 (Sangat Rendah) yang sesuai dengan hasil perhitungan rasio. Kondisi ini menunjukkan posisi likuiditas yang kuat dan risiko likuiditas berada pada level paling rendah.
2	Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar		
	Aset Likuid	Rp 43.123.157.976	
	Kewajiban Lancar	Rp 78.110.425.938	
	Hasil	55.21%	
	Peringkat Risiko Inheren Likuiditas - Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	Peringkat Risiko: 1	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 32,95% yang berada di atas ambang $\geq 20\%$ untuk peringkat 1 (Sangat Rendah) sebagaimana ditetapkan OJK, sehingga memenuhi kriteria likuiditas yang memadai dan termasuk dalam kategori BDPI; dengan demikian, risiko likuiditas dinilai sangat rendah sesuai dengan standar regulasi dan kebijakan internal PT. BPR DESA SANUR.
3	Rasio kredit yang diberikan terhadap total DPK (LDR)		
	Kredit Yang Diberikan (KYD)	Rp 95.948.412.199	
	Total DPK	Rp 124.614.105.926	
	Hasil	77%	



	Peringkat Risiko Inheren Likuiditas - Rasio kredit yang diberikan terhadap total DPK (LDR)	Peringkat Risiko: 1	PT. BPR DESA SANUR mencatat LDR sebesar 77% (Kredit Yang Diberikan Rp95.948.412.199 terhadap Total DPK Rp124.614.105.926), yang berada di bawah batas maksimum 90% untuk Peringkat 1 (Sangat Rendah) menurut kriteria OJK. Dengan LDR <90%, risiko likuiditas tergolong sangat rendah dan tidak memerlukan perhatian khusus terkait kredit berkualitas tidak baik. Oleh karena itu, pemilihan Peringkat Risiko 1 (Sangat Rendah) sesuai dengan regulasi OJK dan data internal PT. BPR DESA SANUR.
4	Rasio 25 depasan dan penabung terbesar terhadap total DPK		
	25 Depasan dan penabung terbesar	Rp 47.606.155.221	
	Total DPK	Rp 124.614.105.926	
	Hasil	38.2%	
	Peringkat Risiko Inheren Likuiditas - Rasio 25 depasan dan penabung terbesar terhadap total DPK	Peringkat Risiko: 3	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio 38,2 % yang berada di atas batas 25 % sehingga tidak termasuk peringkat 1 (Sangat Rendah). Sesuai kriteria OJK, rasio >25 % dengan mayoritas nasabah lama menempatkan pada peringkat 3 (Sedang). Data bank menunjukkan komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25 % dan sebagian besar merupakan nasabah lama, konsisten dengan peringkat yang dipilih. Dengan demikian, penilaian risiko likuiditas berada pada tingkat sedang.
5	Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan		
	Pendanaan Non Inti	Rp 11.966.082.126	
	Total Pendanaan	Rp 124.614.105.926	
	Hasil	9.6%	
	Peringkat Risiko Inheren Likuiditas - Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan	Peringkat Risiko: 2	PT. BPR DESA SANUR mencatat bahwa rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan sebesar 9.6% berada di bawah batas maksimum 10% untuk peringkat risiko likuiditas 1 (Sangat Rendah)



PT. BPR DESA SANUR

JL. DANAU BUYAN III / 2

Telepon: 0361288246

Website: <https://bprdesasanur.com/>, Email: bprsanur@gmail.com

			menurut kriteria OJK. Dengan nilai tersebut, pendanaan non inti tidak signifikan dan tidak mendominasi total pendanaan BPR. Oleh karena itu, peringkat risiko yang dipilih yaitu 1 (Sangat Rendah) sesuai dengan ketentuan regulasi.
--	--	--	--



4. Pemantauan Limit Manajemen Risiko

Indikator / Rasio		Realisasi	+ / -	Risk Appetite	Risk Tolerance	Risk Appetite Over?	Risk Tolerance Over?	Analisis dan Tindak Lanjut Over Limit
1. Risiko Kredit								
a	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset	96.93%	-	≤90%	≤95%	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio aset produktif terhadap total aset sebesar 96.93% yang melebihi batas risk appetite (≤90%) dan risk tolerance (≤95%). Indikator ini berada di atas limit yang ditetapkan. Perlu peninjauan lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kebijakan risiko.
b	Rasio KYD terhadap Total Aset Produktif	70.91%	-	≤73%	≤84%	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Rasio KYD terhadap Total Aset Produktif sebesar 70,91% berada di bawah batas Risk Appetite (73%) dan juga di bawah batas Risk Tolerance (84%); sehingga tidak melampaui limit baik Appetite maupun Tolerance. Dengan demikian, kondisi risiko masih dalam batas yang dapat diterima.
c	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total KYD	44.08%	-	≤20%	≤25%	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR mencatat bahwa rasio 25 debitur terbesar terhadap total KYD sebesar 44.08%, melebihi batas Risk Appetite (≤20%) dan Risk Tolerance (≤25%). Hal ini



								menunjukkan bahwa indikator berada di atas limit baik appetite maupun tolerance, menandakan risiko konsentrasi yang tinggi. Perlu tindakan mitigasi sesuai kebijakan PT. BPR DESA SANUR.
d	Rasio kredit per 3 sektor ekonomi Terbesar terhadap total KYD	94.15%	-	≤83%	≤87%	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio kredit per 3 sektor ekonomi terbesar terhadap total KYD sebesar 94,15% yang melebihi batas Risk Appetite (≤83%) maupun Risk Tolerance (≤87%). Karena keduanya terlampaui, posisi risiko saat ini berada di atas ambang toleransi dan memerlukan tindakan mitigasi segera.
e	Rasio Aset produktif bermasalah / total aset produktif	3.87%	-	≤6.5%	≤8%	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Rasio aset produktif bermasalah sebesar 3,87% berada di bawah batas Risk Appetite (≤6,5%) dan juga di bawah batas Risk Tolerance (≤8%). Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran Risk Appetite maupun Risk Tolerance. Kondisi ini menunjukkan posisi risiko yang masih terkendali sesuai kebijakan PT. BPR DESA SANUR.



f	Rasio Kredit Bermasalah Neto / Total Kredit yang Diberikan	5.46%	-	$\leq 4.5\%$	$\leq 5.5\%$	Ya	Tidak	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio Kredit Bermasalah Neto terhadap Total Kredit yang Diberikan sebesar 5,46%, yang melampaui batas Risk Appetite ($\leq 4,5\%$) namun masih berada di bawah batas Risk Tolerance ($\leq 5,5\%$); dengan demikian Risk Appetite Over Limit? Ya, sedangkan Risk Tolerance Over Limit? Tidak.
g	Rasio Kredit Kualitas Rendah (LAR - Loan at Risk)/ Total Kredit yang Diberikan	5.46%	-	$\leq 15\%$	$\leq 20\%$	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR mencatat bahwa rasio Kredit Kualitas Rendah (LAR/ Total Kredit) sebesar 5,46% berada di bawah batas Risk Appetite ($\leq 15\%$) maupun Risk Tolerance ($\leq 20\%$), sehingga tidak terjadi pelanggaran limit risiko.
h	NPL Gross	0%	-	$\leq 5.5\%$	$\leq 6\%$	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR NPL Gross sebesar 0% berada di bawah batas Risk Appetite 5,5% dan Risk Tolerance 6%, sehingga tidak melampaui limit yang ditetapkan. Dengan demikian, baik Risk Appetite maupun Risk Tolerance tidak terindikasi over limit.
i	Rasio Hapus Buku Kredit Terhadap Outstanding NPL	0%	-	$\leq 8\%$	$\leq 10\%$	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio hapus buku



								kredit terhadap outstanding NPL sebesar 0%, berada di bawah batas Risk Appetite 8% dan Risk Tolerance 10%, sehingga tidak melampaui limit yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada indikasi pelanggaran risk appetite maupun risk tolerance. Kondisi ini menunjukkan posisi risiko yang aman sesuai kriteria yang ada.
j	Rasio Jumlah AYDA Terhadap Outstanding NPL	0%	-	≤18%	≤20%	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Rasio Jumlah AYDA Terhadap Outstanding NPL sebesar 0% berada di bawah batas Risk Appetite (≤18%) dan Risk Tolerance (≤20%). Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran baik pada Risk Appetite maupun Risk Tolerance. Kondisi ini menunjukkan risiko yang sangat rendah pada indikator tersebut.
2. Risiko Operasional								
a	Frekuensi kejadian Human Error yang menimbulkan kerugian pada Bank	0	-	≤2	≤3	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR mencatat bahwa frekuensi kejadian human error yang menimbulkan kerugian adalah 0, berada di bawah batas risk appetite (≤2) dan risk tolerance (≤3),



								sehingga tidak ada pelanggaran risk appetite maupun risk tolerance. Dengan demikian, kondisi risiko saat ini berada dalam batas yang dapat diterima.
b	Kesalahan dan/atau kerusakan pada Core Banking System	0	-	≤ 2	≤ 3	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan kriteria limit risiko, Risk Appetite maksimal 2 dan Risk Tolerance maksimal 3, realisasi kesalahan/ kerusakan pada Core Banking System tercatat 0 sehingga tidak melampaui batas Risk Appetite maupun Risk Tolerance. Dengan kondisi ini, risiko operasional pada sistem inti berada dalam kendali yang aman.
c	Frekuensi Internal Fraud	0	-	≤ 0	≤ 0	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan kriteria limit risiko untuk indikator Frekuensi Internal Fraud (Risk Appetite ≤ 0 dan Risk Tolerance ≤ 0), realisasi menunjukkan frekuensi internal fraud sebesar 0 sehingga tidak melampaui batas Risk Appetite maupun Risk Tolerance.
d	Rasio Jumlah Pegawai Keluar (resign) terhadap	0%	-	$\leq 3\%$	$\leq 4\%$	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Rasio jumlah pegawai



	total pegawai							keluar terhadap total pegawai sebesar 0% berada di bawah batas Risk Appetite ($\leq 3\%$) dan Risk Tolerance ($\leq 4\%$), sehingga tidak terjadi pelanggaran batas risiko; Risk Appetite Over Limit? Tidak; Risk Tolerance Over Limit? Tidak.
3. Risiko Kepatuhan								
a	Teguran dari regulator (OJK dan atau BI)	0	-	≤ 3	≤ 4	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan data, indikator teguran regulator berada pada 0 sehingga tidak melampaui batas Risk Appetite (≤ 3) maupun Risk Tolerance (≤ 4); dengan demikian tidak ada over limit pada kedua indikator.
b	Denda dari regulator (OJK dan atau BI) dalam ribuan rupiah	Rp0	-	$\leq \text{Rp}1000000$	$\leq \text{Rp}1500000$	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Denda regulator saat ini sebesar 0 ribu rupiah, berada di bawah batas Risk Appetite 1.000.000 ribu rupiah dan Risk Tolerance 1.500.000 ribu rupiah, sehingga tidak terjadi over limit pada kedua level. Dengan demikian, posisi risiko denda tetap aman.
c	Pelanggaran atau pelanggaran BMPK	0	-	≤ 0	≤ 0	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan kriteria limit risiko, risk appetite dan risk tolerance masing-masing harus ≤ 0 .



								Pada realisasi, pelanggaran BMPK tercatat 0 sehingga tidak ada over limit pada risk appetite maupun risk tolerance. Dengan demikian, kondisi risiko berada dalam batas yang ditetapkan.
d	% KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum)	0%	+	$\geq 16\%$	$\geq 14\%$	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR: Indikator % KPMM saat ini 0% berada di bawah ambang Risk Appetite 16% dan Risk Tolerance 14%, sehingga tercatat sebagai over limit pada kedua kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan modal minimum belum terpenuhi sesuai standar risiko yang ditetapkan. Perlu tindakan korektif untuk meningkatkan % KPMM agar sesuai dengan batas toleransi risiko.
e	Keterlambatan pelaporan ke OJK dan atau BI atau Instansi terkait	0	-	≤ 2	≤ 3	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan kriteria Risk Appetite ≤ 2 dan Risk Tolerance ≤ 3 , realisasi keterlambatan pelaporan ke OJK/ BI/ Instansi terkait sebesar 0 berada di bawah batas yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi over limit pada Risk Appetite maupun Risk Tolerance. Analisis ini menunjukkan



								bahwa PT. BPR DESA SANUR masih berada dalam batas risiko yang dapat diterima.
f	Temuan berulang pemeriksaan Audit Intern dan Audit Ekstern dan/atau regulator	0	-	≤4	≤3	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR berada dalam batas Risk Appetite (≤4) dan Risk Tolerance (≤3) karena tidak ada temuan berulang pada audit intern, audit ekstern, maupun regulator (0 temuan). Dengan kondisi tersebut, tidak terjadi pelanggaran Risk Appetite maupun Risk Tolerance. Oleh karena itu, risiko saat ini berada pada level yang dapat diterima.
4. Risiko Likuiditas								
a	Cash Ratio	55.21%	+	≥9%	≥8%	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR memiliki Cash Ratio sebesar 55.21% yang jauh melebihi batas Risk Appetite (≥9%) dan Risk Tolerance (≥8%), sehingga tidak terjadi over limit pada kedua indikator tersebut. Hal ini menunjukkan posisi likuiditas PT. BPR DESA SANUR sangat kuat.
b	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	30.98%	+	≥7%	≥6%	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR mencatat Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset sebesar 30,98%, yang berada jauh di atas ambang Risk Appetite (≥7%) maupun Risk Tolerance (≥6%).



								Dengan demikian, indikator ini tidak melampaui batas Risk Appetite maupun Risk Tolerance yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan posisi likuiditas yang kuat dan berada dalam batas risiko yang diterima.
c	LDR	77%	-	≤90%	≤92%	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR LDR saat ini sebesar 77% berada di bawah batas Risk Appetite (≤90%) dan juga di bawah batas Risk Tolerance (≤92%), sehingga tidak terjadi pelanggaran baik pada Risk Appetite maupun Risk Tolerance.
d	Rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	38.2%	-	≤25%	≤30%	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR: Rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga sebesar 38,2% melebihi batas Risk Appetite 25% dan juga batas Risk Tolerance 30%, sehingga keduanya berada di atas limit yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi tinggi pada segmen deposito terbesar yang perlu ditindaklanjuti untuk menurunkan eksposur risiko. Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian strategi pengelolaan dana pihak ketiga



								guna menurunkan rasio tersebut ke dalam batas yang dapat diterima.
e	Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	9.6%	-	≤10%	≤16%	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR mencatat bahwa rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan sebesar 9,6% berada di bawah batas Risk Appetite 10% dan Risk Tolerance 16%, sehingga tidak melampaui limit keduanya. Dengan demikian, posisi risiko tetap dalam batas yang ditetapkan.
5. Risiko Reputasi								
a	Jumlah pengaduan nasabah	0	-	≤2	≤3	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan kriteria limit risiko, risk appetite ditetapkan ≤2 dan risk tolerance ≤3, sementara realisasi jumlah pengaduan nasabah adalah 0 sehingga tidak melampaui batas risk appetite maupun risk tolerance. Analisis ini menunjukkan bahwa kondisi risiko saat ini berada dalam batas yang dapat diterima.
b	Jumlah pemberitaan negatif pihak yang berasosiasi dengan BPR	0	-	≤2	≤3	Tidak	Tidak	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan kriteria limit risiko, risk appetite ditetapkan ≤2 dan risk tolerance ≤3, sementara realisasi menunjukkan



								jumlah pemberitaan negatif pihak yang berasosiasi dengan BPR sebesar 0; dengan demikian tidak terjadi pelanggaran risk appetite maupun risk tolerance. Kondisi ini menandakan bahwa risiko terkait pemberitaan negatif berada dalam batas yang dapat diterima.
6. Risiko Strategik								
a	Aset BPR dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis BPR	0%	+	≥95%	≥90%	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR mencatat bahwa realisasi aset BPR dibandingkan target rencana bisnis adalah 0, sehingga nilai Risk Appetite dan Risk Tolerance berada di atas batas yang ditetapkan (≥95 dan ≥90). Kedua indikator tersebut menunjukkan pelanggaran limit risiko. Hal ini mengindikasikan kebutuhan evaluasi dan penyesuaian strategi risiko secara segera.
b	Kredit BPR dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis BPR	0%	+	≥95%	≥90%	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan data realisasi, indikator Kredit BPR dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis BPR bernilai 0 sehingga Risk Appetite dan Risk Tolerance keduanya berada di atas batas yang ditetapkan (≥95



								dan ≥ 90), menandakan adanya pelanggaran pada kedua limit risiko.
c	DPK BPR dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis BPR	0%	+	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR mencatat bahwa realisasi DPK BPR dibandingkan target rencana bisnis adalah 0, sehingga nilai tersebut berada di atas batas Risk Appetite (≥ 95) dan Risk Tolerance (≥ 90) yang telah ditetapkan; dengan kata lain, baik Risk Appetite maupun Risk Tolerance terindikasi over limit.
d	Posisi KPMM	0%	+	$\geq 16\%$	$\geq 14\%$	Ya	Ya	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan data, posisi KPMM saat ini 0 namun Risk Appetite dan Risk Tolerance masing- masing berada di atas batas yang ditetapkan (≥ 16 dan ≥ 14), sehingga kedua indikator tersebut menunjukkan kondisi over limit. Hal ini menandakan adanya risiko yang perlu ditangani meskipun nilai KPMM nol. Perlu dilakukan evaluasi lanjutan untuk menurunkan level risiko agar sesuai dengan kebijakan risk appetite dan tolerance.
e	Posisi BOPO	0%	-	$\leq 85\%$	$\leq 90.5\%$	Tidak	Tidak	



PT. BPR DESA SANUR

JL. DANAU BUYAN III / 2

Telepon: 0361288246

Website: <https://bprdesasanur.com/>, Email: bprsanur@gmail.com

f	ROA	0%	+	$\geq 2.6\%$	$\geq 2.25\%$	Ya	Ya	
---	-----	----	---	--------------	---------------	----	----	--



5. Portofolio Kredit Per Kolektibilitas

No	Keterangan	Nominal	Performing Loan	Non Performing Loan
1.	Lancar	Rp89.389.865.845	93.16%	0%
2.	Dalam Perhatian Khusus	Rp1.320.238.748	1.38%	0%
3.	Kurang Lancar	Rp427.773.207	0%	0.45%
4.	Diragukan	Rp1.837.927.262	0%	1.92%
5.	Macet	Rp2.972.607.138	0%	3.1%
Total		Rp95.948.412.200	94.54%	5.46%

6. Kontribusi NPL Debitur Inti Dan Non Inti terhadap Total NPL

No	Keterangan	Nominal
1.	Outstanding NPL Debitur Inti	Rp0
2.	Outstanding NPL Debitur Non Inti	Rp6.558.546.355
3.	Outstanding Total NPL	Rp6.558.546.355
4.	Outstanding Kredit Yang Diberikan (KYD)	Rp95.948.415.200
5.	Total NPL	6.84%
6.	KYD (Debitur Inti)	Rp38.399.916.474
7.	NPL (Debitur Inti)	0%
8.	KYD (Debitur Non Inti)	Rp62.754.352.227
9.	NPL (Debitur Non Inti)	10.45%
10.	Kontribusi NPL Debitur Non Inti Terhadap Total NPL	6.84%
11.	Kontribusi NPL Debitur Inti terhadap Total NPL	0%

7. Total Dana Pihak Ketiga dan Low Cost Deposit

Jenis DPK	Nominal	Proporsi
1. Tabungan	Rp62.414.405.000	50.09%
2. Deposito	Rp62.199.700.000	49.91%
Total	Rp124.614.105.000	100%

8. Registrasi Risiko



Tanggal	Kejadian (Event)	Penyebab (Cause)	Dampak Finansial	Dampak Non Finansial	Deskripsi Tindak Lanjut (Action Plan)	Unit Pemilik Risiko (Risk Owner)
30 Juni 2026	Auto debet hanya memotong bunga, tidak/ belum mendebet pokok tambahan	auto debet dilakukan manual	nihil	nihil	sudah dilakukan pendebitan ulang kepada nasabah	operasional
30 Juni 2026	salah penulisan jumlah saldo akhir di buku tabungan	kelalaian petugas	nihil	nihil	bukut tabungan telah dikoreksi	operasional

9. Sepuluh Risiko Tertinggi Perkreditan BPR

No.	Deskripsi Risiko
1	Risiko Kesalahan Pemberian Kredit bukan kepada Pihak yang berkepentingan
2	Kegagalan mengidentifikasi calon debitur bermasalah (di bank lain maupun BPR)
3	Kesalahan perhitungan limit kredit yang belum memperhitungkan : kewajiban kepada bank/ lembaga keuangan lain
4	Risiko Rekayasa data pada Analisa Kredit/ Scoring data
6	Risiko hilangnya bukti kepemilikan agunan.
7.	Risiko kegagalan penagihan kewajiban debitur
8	Risiko Penyalahgunaan hasil collection (tidak disetorkan oleh petugas ke Bank)
9.	Pencairan kredit sebelum pengikatan agunan (minimal cover note dari notaris telah diterima oleh Bank)
10	Risiko Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Menyimpang dari Ketentuan Regulator
11	Portofolio KRK yang cukup tinggi sebesar 27.40% dari total Baki Debet kredit yang diberikan
12	melakukan praktik penyelesaian AYDA melalui kredit di BPR

1 Risiko Tertinggi di bidang kredit untuk meningkatkan kesadaran risiko pegawai dalam menjalankan bisnis.

10. Sepuluh Risiko Tertinggi di Bidang Operasional

No.	Deskripsi Risiko
3	Risiko Selisih Kas (Teller Kurang/Lebih Bayar)
6	Risiko Pencairan Deposito Secara Fiktif
7	Risiko Manipulasi bunga deposito tunai yang belum diambil nasabah
8	Risiko Pembukaan Rekening oleh nasabah yang tidak berhak



10 Risiko kegagalan dalam penerapan APU-PPT

10 Risiko Tertinggi di bidang operasional untuk meningkatkan kesadaran risiko pegawai dalam menjalankan operasional.

11. Pemantauan Pengaduan Nasabah

Tanggal	Produk / Layanan	Permasalahan	Jumlah	Keterangan
10 Februari 2026	Auto Debet	Auto Debet hanya memotong bunga tidak/ belum mendebet pokok tambahan	0	Sudah dilakukan penyesuaian
20 April 2026	Tabungan	Salah penulisan jumlah saldo akhir di buku tabungan	0	telah dilakukan penyesuaian

PENUTUP

Demikian Laporan Manajemen Risiko ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Denpasar, 24 Juli 2026

PT. BPR DESA SANUR

Disiapkan Oleh

Disetujui Oleh

I Wayan Fajar Okta Perdana
PE KEpatuhan

I Made Wandika SE
Direktur YMFK



1. RISIKO KREDIT

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	Rasio aset produktif terhadap total aset	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit rendah	2 (Rasio 97.20%)	1.75	PT. BPR DESA SANUR menilai bahwa rasio aset produktif terhadap total aset sebesar 97.2% berada di atas 95% sehingga memenuhi kriteria peringkat 2 (Rendah) menurut OJK yang menunjukkan eksposur risiko kredit rendah. Total aset produktif sebesar Rp135.316.067.275 dan total aset sebesar Rp139.214.755.570 menghasilkan rasio 97.2% yang konsisten dengan batasan peringkat tersebut.
		Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	<=75%	1 (Rasio 70.91%)		PT. BPR DESA SANUR menilai rasio Total KYD terhadap Total Aset Produktif sebesar 70,91% yang berada di bawah batas maksimal 75% untuk Peringkat 1 (Sangat Rendah) sebagaimana ditetapkan OJK. Dengan rasio tersebut, kriteria OJK mengklasifikasikan risiko kredit sebagai Sangat Rendah



		Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	>20%, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	3 (Rasio 44.08%)		PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio 25 debitur terbesar terhadap KYD sebesar 44.08% yang berada di atas batas 20% untuk peringkat sangat rendah, sehingga sesuai dengan kriteria OJK untuk peringkat 3 (Sedang) yang menetapkan rasio >20% dengan target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama; total baki debit 25 debitur terbesar sebesar Rp42.290.955.046 dan KYD sebesar Rp95.948.412.199 mendukung penetapan peringkat risiko ini.
		Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	> 85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sector ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	2 (Rasio 94.15%)		PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio kredit per tiga sektor ekonomi terbesar terhadap KYD sebesar 94,15% yang berada di atas ambang >85% sebagaimana ditetapkan OJK. Sesuai kriteria OJK, rasio >85% dengan kondisi tidak berubah dalam jangka waktu sangat lama termasuk dalam Peringkat 2
2	Kualitas aset	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	≤ 7%	1 (Rasio 3.87%)	1.33	PT. BPR DESA SANUR: Berdasarkan data risiko kredit, rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif sebesar 3,87% berada di bawah ambang batas 7% untuk Peringkat 1 (Sangat Rendah)



		Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan (NPL net)	Rasio di atas ambang batas peringkat 1. dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik	1 (Rasio 5.46%)	rasio Kredit Bermasalah Neto terhadap KYD kepada bukan bank sebesar 5,46 % berada di atas ambang batas 5 %.
		Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan (KKR)		2 (Rasio 6.84%)	PT. BPR DESA SANUR menilai bahwa rasio Kredit Kualitas Rendah terhadap Kredit Yang Diberikan kepada non-bank sebesar 6,84% berada di bawah ambang batas 7% sehingga termasuk dalam Peringkat 1 (Sangat Rendah) sesuai kriteria OJK.



3	Strategi penyediaan dana	Strategi penyediaan dana	• Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri, dan • Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.	2	2.00	Parameter risiko "Strategi penyediaan dana" dinilai dengan peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit BPR di atas rata-rata industri dan sebagian besar pinjaman disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai, sehingga risiko terkait pendanaan dianggap terbatas. Dengan demikian, strategi penyediaan dana BPR tidak menimbulkan tekanan signifikan terhadap stabilitas keuangan.
4	Faktor eksternal	Faktor eksternal	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman sehingga terjadi tunggakan pinjaman namun tidak menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur.	2	2.00	Parameter risiko "Faktor Eksternal" dinilai dengan peringkat 2 (Rendah). Meskipun terdapat perubahan faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan debitur membayar kembali pinjaman, dampaknya hanya menyebabkan tunggakan pinjaman tanpa menurunkan kualitas kredit debitur secara signifikan. Oleh karena itu, risiko yang teridentifikasi dianggap rendah.
Total Risiko				15	7.08	



Nilai Rata-rata	1.77		
Nilai Self Assessment	2		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan	2	2.00	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi, serta melakukannya secara berkala setidaknya satu kali dalam satu tahun atau jika terjadi perubahan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan minimal dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan risiko kredit.
		Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara	2		Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala, yaitu setiap semester atau lebih sering jika terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan usaha BPR.



kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	2
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi mengomunikasi kan	2

Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Direksi dan diikuti dengan tindak lanjut yang memastikan hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti dalam setiap periode laporan.
Direksi BPR telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit dan melaksanakannya secara konsisten dalam kegiatan usaha. Selain itu, pengkinian kebijakan dilakukan secara berkala terutama ketika terjadi perubahan peraturan, bisnis, atau hasil evaluasi dari Dewan Komisaris.
Direksi BPR memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mengurangi risiko kredit serta mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit. Meskipun kebijakan tersebut telah



kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan	
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. - unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit	2
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan	2

disampaikan, pemahaman yang tidak merata di semua tingkat organisasi belum menyebabkan dampak yang signifikan.

BPR memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit dan manajemen risiko kredit, namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat mengganggu tata kelola yang baik. Unit kerja tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai pedoman yang ditetapkan. BPR juga memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit.

Direksi BPR telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM untuk manajemen risiko kredit dengan peringkat Memadai (2). Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan, namun tidak



		kredit?	kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.			memberikan dampak signifikan, serta upaya konsisten untuk meningkatkan kompetensi SDM. Selain itu, tingkat pemenuhan standar kinerja SDM di unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.	2	2.00	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai, sesuai dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnisnya, serta didukung oleh SDM yang cukup. Meskipun terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR, kebijakan tersebut tetap menunjukkan keselarasan yang baik dalam mengelola risiko kredit.
		Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling	2		BPR dinilai memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi, dengan



limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?	sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.		delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas. Prosedur tersebut dilaksanakan secara konsisten dalam setiap aktivitas fungsional, namun BPR tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur ketika terjadi perubahan bisnis signifikan atau perubahan peraturan perundang- undangan, meskipun hal ini tidak menimbulkan dampak signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk serta pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit, dengan penerapan yang memadai dalam praktiknya. Namun, terdapat ketidaksesuaian yang tidak



		dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.			signifikan antara kebijakan dan prosedur tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur; - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan cukup konsisten.	2	2.00	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit dengan memadai, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit yang terkait dengan kegiatan usaha BPR. Proses ini dilakukan dengan memadai dan konsisten, mencakup analisis kondisi keuangan debitur, laporan keuangan terakhir, proyeksi arus kas, dan dokumen lainnya untuk menilai kredibilitas debitur.
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit;	2		BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko



		mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	- data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.			kredit. Sistem ini menyediakan data yang lengkap, akurat, dan terkini, serta mendukung Direksi dalam pembuatan laporan setiap semester.
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	1	1.50	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Audit ini mencakup kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan kondisi BPR, dengan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara efektif.
		Apakah sistem pengendalian intern	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan	2		Parameter risiko kredit BPR menilai bahwa sistem pengendalian intern



	terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.		telah dilaksanakan di seluruh jenjang organisasi, namun belum sepenuhnya memerhatikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab tiap jenjang sudah jelas, dengan pemisahan unit SKMR/PEMR dan SKAI/PEAI dari unit yang memiliki eksposur risiko kredit.
	Total KPMR		25	
	Nilai Rata-rata		1.92	
	Nilai Self Assessment		2	

2. RISIKO OPERASIONAL



INHEREN

No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	Skala usaha dan struktur organisasi	• Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah; dan • Struktur organisasi BPR terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR.	1	1.00	Parameter risiko yang dinilai BPR mencakup skala usaha dan struktur organisasi. Peringkat 1 (Sangat Rendah) menunjukkan bahwa skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah, dan struktur organisasi BPR telah terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR. Dengan demikian, risiko terkait skala usaha dan struktur organisasi dianggap sangat rendah.
		Jaringan kantor dan rentang kendali	Jaringan kantor & Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : BPR tidak memiliki jaringan kantor cabang dan/ atau kantor kas.	1		Parameter risiko yang dinilai BPR adalah "Jaringan kantor dan rentang kendali". Dengan peringkat 1 (Sangat Rendah), BPR tidak memiliki jaringan kantor cabang maupun kantor kas, sehingga cakupan operasionalnya sangat terbatas dan tidak menimbulkan risiko signifikan terkait jaringan atau kendali. Hal ini menunjukkan bahwa risiko terkait infrastruktur kantor dan pengawasan eksternal berada pada level paling rendah.
		Keberagaman produk	BPR memiliki produk/jasa yang	1		Parameter risiko "Keberagaman produk



		dan/atau jasa	termasuk kegiatan usaha utama			dan/ atau jasa” dinilai BPR dengan peringkat 1 (Sangat Rendah). Hal ini menunjukkan bahwa BPR memiliki produk atau jasa yang sangat terfokus pada kegiatan usaha utama, sehingga tidak ada diversifikasi produk yang signifikan. Akibatnya, risiko terkait ketergantungan pada satu lini produk menjadi minim.
		Tindakan korporasi	- BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan; - BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPR; dan - BPR tidak dalam proses penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru.	1		Parameter risiko “Tindakan korporasi” dinilai sangat rendah (peringkat 1) karena BPR tidak sedang mengalami proses penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan. Selain itu, tidak ada rencana pemindahan kantor pusat maupun peluncuran produk atau aktivitas baru, sehingga risiko terkait perubahan struktur korporasi dianggap minimal. Dengan kondisi tersebut, BPR berada pada posisi stabil dan tidak menghadapi risiko signifikan dalam aspek korporasi.
2	Sumber daya manusia (SDM)	Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	Kuantitas dan kualitas SDM BPR memadai.	2	2.00	Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM BPR dinilai pada peringkat 2 (Rendah), yang menunjukkan bahwa jumlah dan kompetensi tenaga kerja di lembaga ini memadai. Dengan sumber daya manusia yang cukup, BPR dapat mendukung operasional harian dan memenuhi kebutuhan layanan nasabah tanpa menimbulkan risiko signifikan.



						Peringkat ini menegaskan bahwa risiko terkait SDM tidak menjadi faktor kritis dalam penilaian keseluruhan.
		Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	• Terjadi human error pada BPR; namun • tidak berdampak finansial bagi BPR.	2		Parameter risiko "Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)" dinilai dengan peringkat 2 (Rendah). Penjelasan menunjukkan bahwa meskipun terjadi human error di BPR, kejadian tersebut tidak menimbulkan dampak finansial bagi lembaga. Dengan demikian, risiko ini dianggap tidak signifikan terhadap stabilitas keuangan BPR.
3	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	• TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan • BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.	2	2.00	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI) di BPR dinilai dengan peringkat 2 (Rendah), karena sebagian besar sistem TI BPR sudah sesuai dengan ketentuan mengenai Sistem Penyelenggaraan Teknologi Informasi (SPTI). Selain itu, BPR tidak sedang melakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TI, sehingga risiko terkait TI dianggap rendah.
4	Penyimpangan (fraud)	Penyimpangan (fraud)	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR	1	1.00	Parameter risiko yang dinilai BPR adalah penyimpangan (fraud) dengan peringkat 1 (Sangat Rendah). Peringkat ini menunjukkan tidak terdapat indikasi penyimpangan atau kecurangan pada BPR. Hal ini menandakan bahwa BPR telah menerapkan kontrol internal yang



						memadai untuk mencegah risiko fraud.
5	Faktor eksternal	Faktor eksternal	Tidak terdapat kejadian eksternal	1	1.00	BPR menilai risiko faktor eksternal sebagai **Sangat Rendah** (peringkat 1) karena tidak ada kejadian eksternal yang tercatat. Dengan demikian, tidak ada ancaman luar yang dapat memengaruhi operasional atau keuangan BPR. Hal ini menunjukkan stabilitas lingkungan eksternal bagi lembaga.
Total Risiko				12	7.00	
Nilai Rata-rata				1.40		
Nilai Self Assessment				1		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling	2	2.00	Dewan Komisaris BPR telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi, serta secara berkala melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam setahun, atau lebih sering bila terjadi perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha. Dengan



			sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.			demikian, tingkat kepatuhan terhadap parameter risiko ini dinilai memadai (peringkat 2).
	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	2		Dewan Komisaris BPR telah melakukan evaluasi berkala – setiap semester – terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional, termasuk ketika terjadi perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha. Evaluasi ini didasarkan pada laporan yang disampaikan Direksi dan Dewan Komisaris memastikan adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut pada setiap periode laporan. Dengan demikian, risiko diidentifikasi dan ditangani secara sistematis, menandai tingkat kepatuhan “Memadai”.	
	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian	2		Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan tersebut secara konsisten. Selain itu, Direksi secara berkala melakukan pengkinian kebijakan tersebut ketika terjadi perubahan ketentuan peraturan	



	terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	2
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;	2

perundang-undangan, perubahan bisnis, atau hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris. Dengan demikian, penilaian risiko BPR terhadap parameter ini berada pada peringkat 2 (Memadai).

Direksi BPR telah memadai dalam mengambil tindakan mitigasi risiko operasional dan mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepada seluruh jenjang organisasi. Meskipun tidak semua level organisasi sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, hal ini tidak menimbulkan dampak signifikan bagi operasional. Secara keseluruhan, kemampuan dan komunikasi manajemen risiko operasional di tingkat direksi sudah mencukupi.

BPR dinilai memadai (peringkat 2) karena telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional, meski belum lengkap dan tidak ada rangkap jabatan, sehingga tata kelola masih dapat terpengaruh. Unit tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai pedoman, serta memiliki SKMR atau PEMR yang



			- unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.			mampu memitigasi risiko operasional. Namun, kekurangan dalam struktur organisasi menandakan perlunya perbaikan agar pengelolaan risiko lebih konsisten.
		Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional?	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	2		Direksi telah memadai dalam menerapkan kebijakan pengelolaan SDM untuk manajemen risiko operasional. Meskipun terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan, dampaknya tidak signifikan karena adanya upaya konsisten peningkatan kompetensi. Selain itu, unit kerja operasional memenuhi standar kinerja SDM sesuai tugas dan tanggung jawab, menandakan pemenuhan yang memadai.
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip	2	1.67	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai, dengan keselarasan terhadap visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM. Meskipun terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR



	bisnis, serta kecukupan SDM?	mengenal nasabah dan karyawan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional		terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah, dan karyawan, secara keseluruhan kebijakan tersebut dinilai cukup memadai.
	Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko	- memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko	1	BPR Desa Sanur telah memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dan melakukan review terhadap setiap perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan



		operasional secara berkala?	operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.			
		Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan ketentuan?	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	2		BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan. Meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur dengan ketentuan yang berlaku, BPR secara umum telah menerapkan kebijakan dan prosedur tersebut dengan baik. Oleh karena itu, parameter ini dinilai dengan peringkat 2 (Memadai).
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi,	2	1.75	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh kegiatan usahanya, dengan mempertimbangkan berbagai potensi kegagalan seperti sistem, hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, dan penyimpangan. Meskipun penerapannya dinilai memadai, konsistensi dalam pelaksanaannya masih perlu



			penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; ☐ penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.		ditingkatkan.
	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	2		BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional. Sistem ini mencerminkan risiko operasional dengan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, serta mendukung pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan agar sistem dapat lebih optimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan.
	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	- telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;	1		BPR dinilai sangat memadai (peringkat 1) karena telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang ditetapkan oleh Direksi, serta



			- telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan tersebut. Selain itu, BPR juga telah mengimplementasikan aspek pengamanan TI sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan kepatuhan dan kesiapan terhadap regulasi. Dengan demikian, risiko terkait TI pada BPR dianggap terkelola dengan baik.
		Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi Risiko terkait kejadian eksternal?	- telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; - telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2		BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal dengan cukup memadai, termasuk memiliki rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, rencana pemulihan bencana dan uji coba yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan OJK, meskipun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional,	1	1.50	PE AI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko pada masing-masing unit BPR dan telah melaporkan hasil



	terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbang kan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.		audit kepada Direktur Utama, tindak lanjut temuan pemeriksaan sudah dipenuhi
	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki	2	Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik pada masing- masing jenjang organisasi, berdasarkan jobdesc pada masing- masing bagian



		eksposur Risiko operasional; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.			
	Total KPMR		27		
	Nilai Rata-rata		1.80		
	Nilai Self Assessment		2		

3. RISIKO KEPATUHAN

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan lain selama periode penilaian.	1	1.00	Parameter risiko yang dinilai BPR meliputi jenis pelanggaran, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan. Peringkat 1 (Sangat Rendah) menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain selama periode



						penilaian. Dengan demikian, risiko operasional dan kepatuhan dianggap minimal.
		Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	Tidak terdapat pelanggaran berulang, dan pelanggaran di periode sebelumnya sudah selesai ditindaklanjuti.	1		Parameter risiko "Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran" dinilai dengan peringkat 1 (Sangat Rendah) karena tidak terdapat pelanggaran berulang dan semua pelanggaran di periode sebelumnya sudah selesai ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemantauan dan perbaikan telah berjalan efektif, sehingga dampak risiko terhadap operasi BPR sangat minimal. Dengan demikian, BPR dapat menganggap risiko ini tidak memerlukan tindakan korektif tambahan.
2	Faktor kelemahan aspek hukum	Kelemahan dalam perikatan	• Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan • Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian.	1	1.00	Parameter risiko "Kelemahan dalam perikatan" dinilai dengan peringkat 1 (Sangat Rendah). Hal ini karena terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian, serta tidak ditemukan kelemahan dalam klausula perjanjian. Dengan demikian, risiko terkait perikatan dianggap minimal.
		Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR	Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan.	1		Tidak terdapat gugatan



		akibat gugatan			
		Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.	1	Tidak terdapat gugatan yang mengakibatkan kerugian BPR
	Total Risiko			5	2.00
	Nilai Rata-rata			1.00	
	Nilai Self Assessment			1	

KPMR						
No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan	2	1.86	Dewan Komisaris BPR telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi, sekaligus melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan minimal satu kali dalam setahun, atau lebih sering bila terjadi perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha. Dengan demikian, tingkat kepatuhan terhadap risiko kepatuhan dianggap memadai.



			yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.		
	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	2		Dewan Komisaris BPR telah melakukan evaluasi secara berkala – setidaknya setiap semester – terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan. Evaluasi tersebut didasarkan pada laporan Direksi dan disesuaikan bila ada perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap hasil evaluasi diikuti dengan tindak lanjut yang tepat pada setiap periode laporan.
	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan	2		Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan tersebut secara konsisten. Selain itu, Direksi rutin melakukan pengkinian kebijakan ketika ada perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, atau hasil evaluasi Dewan Komisaris. Dengan demikian, penilaian risiko kepatuhan berada pada level memadai (peringkat 2).



	perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	2
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	- memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; - satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan	2

Setiap perubahan kebijakan telah dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi BPR yaitu dengan mensosialisasikan atau mengumumkan ke WA grup BPR
PE Kepatuhan dan PE MR dilaksanakan oleh satu orang yang sama, sudah menjalankan sesuai jobdesc dan pedoman kerja



		- memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan		
	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	- terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	1	tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	- Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggara kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan - memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR namun tidak berjalan optimal.	2	Kebijakan internal dan kebijakan-kebijakan terhadap ketentuan perundang- undangan telah disusun oleh Direksi, demi terselenggaranya fungsi kepatuhan BPR Desa Sanur.



2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	2	1.67	BPR Desa Sanur telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan.
		Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan	1		BPR Desa Sanur telah memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dan melakukan review terhadap setiap perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan.



		seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?	dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.			
		Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	2		BPR telah menunjukkan kepatuhan yang memadai dengan memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk serta pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai ketentuan. Kebijakan tersebut secara konsisten diimplementasikan ketika produk baru diterbitkan atau aktivitas baru dilaksanakan, meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian yang tidak signifikan. Secara keseluruhan, BPR mampu menjaga eksposur risiko kepatuhan dalam batasan yang dapat diterima.
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi,	2	2.00	BPR Desa Sanur telah melakukan penerapan manajemen risiko kepatuhan secara memadai dan cukup



		kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.	2		konsisten terhadap kegiatan usaha BPR dengan melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap kegiatan usaha BPR
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan			BPR Desa Sanur telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta membantu PE MR dalam pembuatan laporan semesteran.



			laporan kepada Direksi setiap semester.			
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbang kan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	2	2.00	PE AI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko pada masing-masing unit BPR dan telah melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan sudah ditindaklanjuti
		Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur	2		Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik pada masing- masing jenjang organisasi, berdasarkan jobdesc pada masing-masing bagian.



			Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.			
	Total KPMR			26		
	Nilai Rata-rata			1.86		
	Nilai Self Assessment			2		

4. RISIKO LIKUIDITAS

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan



1	Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	Rasio aset likuid terhadap total aset	>15%	1 (Rasio 30.98%)	2.20	PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio aset likuid terhadap total aset sebesar 18,49% yang berada di atas ambang batas 15% untuk peringkat risiko likuiditas sangat rendah menurut kriteria OJK; dengan demikian aset likuid perusahaan cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo.
		Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	>20%	1 (Rasio 55.21%)		PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 32,95% yang berada di atas ambang $\geq 20\%$ untuk peringkat 1 (Sangat Rendah) sebagaimana ditetapkan OJK,
		Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	< 90%	1 (Rasio 77%)		PT. BPR DESA SANUR mencatat LDR sebesar 77% (Kredit Yang Diberikan Rp95.948.412.199 terhadap Total DPK Rp124.614.105.926), yang berada di bawah batas maksimum 90% untuk Peringkat 1 (Sangat Rendah) menurut kriteria OJK.



	Rasio 25 depasan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah lama	3 (Rasio 38.20%)
	Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan terhadap total pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPR	2 (Rasio 9.6%)
			PT. BPR DESA SANUR mencatat rasio 38,2 % yang berada di atas batas 25 % sehingga tidak termasuk peringkat 1 (Sangat Rendah). Sesuai kriteria OJK, rasio >25 % dengan mayoritas nasabah lama menempatkan pada peringkat 3 (Sedang).
			PT. BPR DESA SANUR mencatat bahwa rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan sebesar 9.6% berada di bawah batas maksimum 10% untuk peringkat risiko likuiditas 1 (Sangat Rendah) menurut kriteria OJK.



2	Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, misalnya dengan melihat kewajaran suku bunga sumber dana yang diperoleh.	• BPR mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik.	2	2.00	BPR dinilai memiliki risiko rendah (peringkat 2) dalam hal kebutuhan pendanaan, baik dalam situasi normal maupun krisis. Hal ini karena BPR mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas dengan baik, serta arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutup pada mayoritas skala waktu. Selain itu, suku bunga sumber dana yang diperoleh BPR dinilai wajar, menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola pendanaan.
		Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	Akses BPR pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPR baik, pinjaman bank yang sewaktu- waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/ perusahaan induk/ intra grup BPR.	2		Peringkat 2 (Rendah) menunjukkan bahwa BPR memiliki akses yang memadai terhadap sumber pendanaan, didukung oleh reputasi yang baik, pinjaman bank yang dapat ditarik sewaktu- waktu, serta komitmen atau dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali atau perusahaan induk/intra grup.
	Total Risiko			15	4.20	
	Nilai Rata-rata			2.10		
	Nilai Self Assessment			2		



No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	2	2.00	-
		Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan	2		Dewan Komisaris BPR telah secara berkala (setidaknya setiap semester) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan laporan Direksi, dan bila terdapat perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha, evaluasi dapat dilakukan lebih sering. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan pada setiap periode



	- Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan	
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	2
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas	2

laporan.

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai kebijakan tersebut secara konsisten. Selain itu, Direksi secara berkala memperbarui kebijakan likuiditas ketika terjadi perubahan peraturan, perubahan bisnis, atau hasil evaluasi Dewan Komisaris. Dengan demikian, penilaian risiko likuiditas dianggap memadai (peringkat 2).

Direksi BPR telah menunjukkan kemampuan yang memadai dalam mengambil tindakan mitigasi risiko likuiditas dan mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas kepada seluruh jenjang organisasi. Meskipun tidak semua level di dalam BPR sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, hal ini tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional. Secara keseluruhan, penilaian menunjukkan bahwa



	organisasi BPR?	yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.		pengelolaan risiko likuiditas berada pada tingkat yang dapat diterima.
	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.	2	BPR dinilai memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan Manajemen Risiko likuiditas dengan peringkat 2 (Memadai). Meskipun unit kerja yang menangani likuiditas belum lengkap, unit tersebut sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai pedoman, serta memiliki SKMR atau PEMR yang mampu memitigasi risiko likuiditas. Dengan demikian, BPR menunjukkan kesiapan yang memadai namun masih ada ruang untuk pengembangan struktur organisasi lebih komprehensif.
	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	2	BPR menunjukkan bahwa Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM untuk manajemen risiko likuiditas dengan tingkat memadai. Meskipun terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM pada beberapa jabatan, dampaknya tidak signifikan dan ada upaya konsisten peningkatan kompetensi. Selain itu, pemenuhan standar kinerja SDM di unit likuiditas sesuai tugas dan tanggung jawab sudah terwujud.



2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	2	2.33	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai, termasuk penilaian kondisi pasar, penanganan risiko konsentrasi likuiditas, serta pencegahan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Meskipun terdapat ketidaksesuaian tidak signifikan antara kebijakan tersebut dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR— seperti indikator peringatan dini, kebutuhan pendanaan berkala, dan potensi kekurangan likuiditas — kebijakan tetap selaras dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta didukung kecukupan SDM. Dengan demikian, risiko likuiditas di BPR dapat dikelola secara efektif dan responsif terhadap dinamika pasar.
		Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan	- memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga	2		BPR menilai risiko likuiditasnya sebagai memadai (peringkat 2) karena telah memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit yang ditetapkan oleh Direksi, lengkap dengan jenjang delegasi wewenang, pertanggungjawaban, dan dokumentasi yang memudahkan audit. Prosedur tersebut juga dilaksanakan



prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.		secara konsisten di semua aktivitas fungsional. Meskipun belum melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur ketika terjadi perubahan bisnis signifikan atau regulasi, dampaknya tidak dianggap signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau	3	tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;



			aktivitas baru dengan ketentuan			
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten	2	2.00	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas secara memadai, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas yang terkait dengan kegiatan usahanya. Proses tersebut mencakup penilaian struktur simpanan, semua arus kas masuk dan keluar, kebutuhan pendanaan, kemampuan memperoleh likuiditas, serta aset likuid yang dapat dikonversi, khususnya dalam kondisi krisis. Penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan secara konsisten dan sesuai standar yang diharapkan.
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen	2		telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.



		telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.			
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbang kan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	2	2.50	Parameter ini menilai apakah SKAI atau PEAI secara rutin melakukan audit internal atas penerapan Manajemen Risiko Likuiditas, kemudian melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan menindaklanjuti temuan. Peringkat "Memadai" menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan, rekomendasi disampaikan, dan sebagian temuan diikuti, meskipun tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti sepenuhnya namun tidak menimbulkan dampak signifikan.
		Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah	3		Penilaian risiko likuiditas di BPR menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan pada semua jenjang organisasi, namun



PT. BPR DESA SANUR

Jalan Danau Buyan III No 2 Sanur

Telepon: 0361288246

Website: bprsanur.com, Email: bprsanur@gmail.com

	dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.		tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko. Meskipun terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta pemisahan SKMR/ PEMR dan SKAI/ PEAI dari unit eksposur risiko, dampak signifikan masih terabaikan, sehingga peringkatnya dianggap cukup memadai.
	Total KPMR		28	
	Nilai Rata-rata		2.15	
	Nilai Self Assessment		2	